

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NOMOR: 43 /PK/2015

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN ATAS LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL
PADA TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemotongan lebih bayar dana bagi hasil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN ATAS LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum,

perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6. Lebih bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah dibayarkan ke daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.

Pasal 2

- (1) Lebih bayar DBH diperhitungkan dengan cara pemotongan terhadap DBH jenis yang sama pada penyaluran triwulan II, triwulan III, dan/atau triwulan IV pada Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dalam hal lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan seluruhnya, maka sisa lebih bayar diperhitungkan terhadap DBH jenis yang berbeda yang penggunaannya tidak diarahkan (bersifat *non-earmarked*) pada penyaluran triwulan III dan/atau triwulan IV pada Tahun Anggaran 2015.
- (3) Dalam hal lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperhitungkan seluruhnya, maka sisa lebih bayar diperhitungkan terhadap penyaluran DAU pada Tahun Anggaran 2015.
- (4) Jenis dana transfer yang penggunaannya tidak diarahkan (bersifat *non-earmarked*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. DBH PPh Pasal 21;
 - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND;
 - c. DBH PBB Bagi Rata;
 - d. DBH PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - e. DBH PBB Sektor Panas Bumi;
 - f. DBH PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Non Migas Lainnya;

84

- g. Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- h. Biaya Pemungutan PBB Sektor Panas Bumi;
- i. Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Non Migas Lainnya;
- j. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi (15%);
- k. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi (30%);
- l. DBH SDA Pertambangan Umum Iuran Tetap;
- m. DBH SDA Pertambangan Umum Royalti;
- n. DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
- o. DBH SDA Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan;
- p. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi;
- q. DBH SDA Perikanan.

Pasal 3

- (1) Pemotongan lebih bayar DBH mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, alokasi, dan kapasitas fiskal daerah.
- (2) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan pada penghitungan alokasi DAK Tahun Anggaran 2015.
- (3) Persentase pemotongan lebih bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. setinggi-tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari penerimaan DBH *non-earmarked* Tahun Anggaran 2015 bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi dan daerah dengan kemampuan keuangan sedang.
 - b. setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan DBH *non-earmarked* Tahun Anggaran 2015 bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah.
 - c. setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penerimaan DBH *non-earmarked* Tahun Anggaran 2015 bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sekali.

Pasal 4

Daftar pemotongan lebih bayar DBH tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, yaitu :

51

- Lampiran I : Daftar Pemotongan Lebih Bayar DBH SDA Royalti Pada Tahun Anggaran 2015.
- Lampiran II : Daftar Pemotongan Lebih Bayar DBH PPh Pasal 21 Pada Tahun Anggaran 2015.
- Lampiran III : Daftar Pemotongan Lebih Bayar DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Pada Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Daftar perhitungan dan pemotongan lebih bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar bagi:

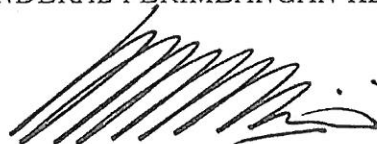
- a. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk memperhitungkan lebih bayar dalam penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015; dan
- b. Pemerintah Daerah untuk memperhitungkan penerimaan DBH pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



St. BOEDIARSO TEGUH WIDODO

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR : 43 /PK/2015
TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN ATAS LEBIH BAYAR DANA BAGI
HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2015

**DAFTAR PEMOTONGAN LEBIH BAYAR DBH SDA ROYALTI
PADA TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Pemerintah Daerah	Lebih Bayar	Potongan ke DBH SDA Royalti Triwulan II	Sisa Lebih Bayar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
1.	Kab. Tanggamus	328.126.130	328.126.130	0

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



Boediarso Teguh Widodo

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR : 43 /PK/2015
TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN ATAS LEBIH BAYAR DANA BAGI
HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2015

**DAFTAR PEMOTONGAN LEBIH BAYAR DBH PPh PASAL 21
PADA TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Pemerintah Daerah	Lebih Bayar	Potongan ke DBH PPh Pasal 21 Triwulan II	Sisa Lebih Bayar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
1.	Kota Yogyakarta	5.579.576.172	5.579.576.172	0
2.	Kab. Mimika	2.524.773.692	2.524.773.692	0
JUMLAH		8.104.349.864	8.104.349.864	0

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,


§ BOEDIARSO TEGUH WIDODO //

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERUBAHAN KEUANGAN
NOMOR : 43 /PK/2015
TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN ATAS LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PEMOTONGAN LEBIH BAYAR DBH PBB DAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB PADA TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Pemerintah Daerah	Lebih Bayar										Potongan I (ke DBH PBB Migas Triwulan II)	Potongan II (ke DBH SDA Royalti Triwulan II)	Potongan ke PPh Pasal 21 Triwulan II	Sisa Lebih Bayar		
		DBH PBB Bagian Daerah					BP PBB Bagian Daerah										
		Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	(7)	(8)					(9)	(10)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = 3+4+5+6+7+8+9+10	(12)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)					
1	Provinsi Aceh	0	7.482.444	0	0	0	363.730	0	0	0	0	0	7.846.174	0	0	0	0
2	Kab. Aceh Besar	0	0	0	0	72.257	0	0	0	0	0	0	72.257	0	0	0	0
3	Kab. Aceh Tengah	0	17.838.325	0	0	0	650.353	0	0	0	0	0	18.488.678	0	0	0	0
4	Kab. Aceh Utara	0	4.499.285	0	0	0	164.027	0	0	0	0	0	4.663.312	0	0	0	0
5	Kab. Bireuen	0	1.202.369	0	0	0	43.832	0	0	0	0	0	1.246.201	0	0	0	0
6	Kab. Simeulue	56.609.280	0	0	0	10.024.560	0	0	0	0	0	0	66.633.840	0	0	0	0
7	Kab. Bener Meriah	0	6.389.814	0	0	0	232.959	0	0	0	0	0	6.622.773	0	0	0	0
8	Kota Subulussalam	0	0	4.941.055	0	0	0	0	0	154.392	0	0	5.095.447	0	0	0	0
9	Kab. Asahan	0	1.194.428	0	0	0	55.152	0	0	0	0	0	1.249.580	0	0	0	0
10	Kab. Dairi	0	3.066.829	1.556.919.109	0	0	141.625	61.628.043	0	0	0	0	1.621.755.606	0	0	0	0
11	Kab. Karo	0	0	244.929.761	0	0	0	0	0	9.695.134	0	0	254.624.895	0	0	0	0
12	Kab. Mandailing Natal	0	12.943.091	0	0	0	597.706	0	0	0	0	0	13.540.797	0	0	0	0
13	Kab. Tapanuli Selatan	852.181.762	0	0	0	191.941.155	0	0	0	0	0	0	1.044.122.917	0	0	0	0
14	Kab. Tapanuli Tengah	0	5.474.090	0	0	0	252.795	0	0	0	0	0	5.726.885	0	0	0	0
15	Kab. Tapanuli Utara	0	23.653.014	0	0	0	1.092.297	0	0	0	0	0	24.745.311	0	0	0	0
16	Kota Binjai	0	0	0	0	561.882	0	0	0	0	0	0	561.882	0	0	0	0
17	Kota Padang Sidempuan	31.900.892	0	0	0	7.250.788	0	0	0	0	0	0	39.151.680	0	0	0	0
18	Kab. Pakpak Bharat	0	0	38.208.843	0	0	0	0	0	1.512.422	0	0	39.721.265	0	0	0	0
19	Kab. Nias Selatan	0	56.946.844	0	0	0	2.629.823	0	0	0	0	0	59.576.667	0	0	0	0

(dalam rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Lebih Bayar												Potongan I (ke DBH PBB Migas Triwulan II)	Potongan II (ke DBH SDA Royakti Triwulan II)	Potongan ke PPh Pasal 21 Triwulan II	Sisa Lebih Bayar	
		DBH PBB Bagian Daerah				BP PBB Bagian Daerah				Jumlah Lebih Bayar	Potongan I (ke DBH PBB Migas Triwulan II)	Potongan II (ke DBH SDA Royakti Triwulan II)	Potongan ke PPh Pasal 21 Triwulan II					Sisa Lebih Bayar
		Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi									
49	Kab. Sukabumi	0	77.973.045	49.299.150	0	0	3.600.839	1.951.413	0	0	0	132.824.447	0	0	0	0		
50	Kab. Sumedang	0	544.495.737	0	0	0	25.145.108	0	0	0	0	569.640.845	0	0	0	0		
51	Kota Tasikmalaya	0	12.596.813	0	0	0	581.723	0	0	0	0	13.178.536	0	0	0	0		
52	Kota Banjar	0	349.372	0	0	0	16.121	0	0	0	0	365.493	0	0	0	0		
53	Kab. Bandung Barat	0	0	2.279.904	0	0	0	90.236	0	0	0	2.370.140	0	0	0	0		
54	Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	51.581.670	0	0	0	0	51.581.670	0	0	0	0		
55	Kab. Banyumas	0	100.615.874	0	0	0	3.912.829	0	0	0	0	104.528.703	0	0	0	0		
56	Kab. Batang	0	0	0	0	0	41.905.933	0	0	0	0	41.905.933	0	0	0	0		
57	Kab. Blora	38.478.173	0	0	0	0	7.570.168	0	0	0	0	46.048.341	0	0	0	0		
58	Kab. Brebes	0	0	0	0	0	25.599.236	0	0	0	0	25.599.236	0	0	0	0		
59	Kab. Demak	0	12.686.956	0	0	0	493.376	0	0	0	0	13.180.332	0	0	0	0		
60	Kab. Jepara	0	0	0	0	0	82.841.708	0	0	0	0	82.841.708	0	0	0	0		
61	Kab. Kendal	0	0	0	0	0	43.323.036	0	0	0	0	43.323.036	0	0	0	0		
62	Kab. Klaten	0	2.434.652	0	0	0	94.680	0	0	0	0	2.529.332	0	0	0	0		
63	Kab. Pati	0	0	0	0	0	31.246.964	0	0	0	0	31.246.964	0	0	0	0		
64	Kab. Pekalongan	0	0	0	0	0	38.308.658	0	0	0	0	38.308.658	0	0	0	0		
65	Kab. Pemalang	0	0	0	0	0	15.400.223	0	0	0	0	15.400.223	0	0	0	0		
66	Kab. Semarang	0	0	0	0	0	60.585.019	0	0	0	0	60.585.019	0	0	0	0		
67	Kab. Sukoharjo	0	1.310.816	0	0	0	50.973	0	0	0	0	1.361.789	0	0	0	0		
68	Kab. Tegal	0	0	0	0	0	7.074.150	0	0	0	0	7.074.150	0	0	0	0		
69	Kab. Temanggung	0	27.507.540	0	0	0	1.069.736	0	0	0	0	28.577.276	0	0	0	0		
70	Kab. Wonogiri	0	2.055.119	0	0	0	79.918	0	0	0	0	2.135.037	0	0	0	0		
71	Kota Salatiga	0	0	0	0	0	705.975	0	0	0	0	705.975	0	0	0	0		
72	Provinsi Jawa Timur	0	506.875.710	60.563.334	0	0	14.079.867	1.682.297	0	0	0	583.201.208	0	0	0	0		
73	Kab. Bangkalan	0	3.529.039	0	0	0	147.027	0	0	0	0	3.676.066	0	0	0	0		
74	Kab. Banyuwangi	0	1.179.472.662	43.885.143	0	0	49.144.690	1.523.778	0	0	0	1.274.026.273	0	0	0	0		
75	Kab. Blitar	0	0	2.498.014	0	0	0	86.734	0	0	0	2.584.748	0	0	0	0		
76	Kab. Bojonegoro	0	193.534.142	0	0	0	8.063.907	0	0	0	0	201.598.049	0	0	0	0		
77	Kab. Bondowoso	0	124.876.461	0	0	0	5.203.171	0	0	0	0	130.079.632	0	0	0	0		

No.	Pemerintah Daerah	Lebih Bayar												Potongan I (ke DBH PBB Migas Triwulan II)	Potongan II (ke DBH SDA Royalti Triwulan II)	Potongan ke PPh Pasal 21 Triwulan II	Sisa Lebih Bayar
		DBH PBB Bagian Daerah				BP PBB Bagian Daerah				Jumlah Lebih Bayar							
		Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi				
78	Kab. Gresik	0	87.783.564	68.621.809	0	0	3.657.640	2.382.686	0	162.445.699	162.445.699	0	0	0	0		
79	Kab. Kediri	0	4.471.278	0	0	186.299	0	0	0	4.657.577	4.657.577	0	0	0	0		
80	Kab. Lamongan	0	49.243.687	0	0	2.051.804	0	0	0	51.295.491	51.295.491	0	0	0	0		
81	Kab. Malang	0	0	1.586.440	0	0	0	55.080	0	1.641.520	1.641.520	0	0	0	0		
82	Kab. Nganjuk	0	244.068.244	0	0	10.169.496	0	0	0	254.237.740	254.237.740	0	0	0	0		
83	Kab. Pacitan	0	0	14.810.247	0	0	0	514.233	0	15.324.480	15.324.480	0	0	0	0		
84	Kab. Pasuruan	0	21.696.535	100.319.261	0	0	904.006	3.483.300	0	126.403.102	126.403.102	0	0	0	0		
85	Kab. Ponorogo	0	0	8.173.481	0	0	0	283.798	0	8.457.279	8.457.279	0	0	0	0		
86	Kab. Probolinggo	0	150.265.811	0	0	6.261.062	0	0	0	157.098.760	157.098.760	0	0	0	0		
87	Kab. Situbondo	0	563.151.791	0	0	23.464.653	0	0	0	586.616.444	586.616.444	0	0	0	0		
88	Kab. Sumenep	0	516.409.578	0	0	21.517.053	0	0	0	537.926.631	537.926.631	0	0	0	0		
89	Kab. Trenggalek	0	1.797.804.043	21.074.970	0	0	74.908.494	731.754	0	1.894.519.261	1.894.519.261	0	0	0	0		
90	Kab. Tuban	0	265.985.889	0	0	11.082.739	0	0	0	277.068.628	277.068.628	0	0	0	0		
91	Kab. Tulungagung	0	1.118.137.413	5.766.247	0	0	46.589.044	200.209	0	1.170.692.913	1.170.692.913	0	0	0	0		
92	Kota Kediri	0	2.755.025	0	0	114.792	0	0	0	2.869.817	2.869.817	0	0	0	0		
93	Kota Batu	0	24.395.865	0	0	1.016.488	0	0	0	25.412.353	25.412.353	0	0	0	0		
94	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0	56.282.019	0	0	0	56.282.019	56.282.019	0	0	0	0		
95	Kab. Sanggau	0	18.977.128	0	0	790.708	0	0	0	19.767.836	19.767.836	0	0	0	0		
96	Kab. Sintang	0	0	0	0	68.574.866	0	0	0	68.574.866	68.574.866	0	0	0	0		
97	Kota Singkawang	635.877	0	0	0	131.359	0	0	0	767.236	767.236	0	0	0	0		
98	Kab. Melawi	0	0	0	0	20.593.526	0	0	0	20.593.526	20.593.526	0	0	0	0		
99	Kab. Kapuas	0	444.554.052	7.985.178.222	0	28.765.748	15.127.175	232.901.020	0	8.706.526.217	3.601.704.250	4.454.842.217	649.979.750	0	0		
100	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0	84.622.410	0	0	0	84.622.410	84.622.410	0	0	0	0		
101	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	330.889.870	0	0	0	9.650.951	0	340.540.821	340.540.821	0	0	0	0		
102	Kab. Katingan	0	0	644.168.998	0	0	0	18.788.247	0	662.957.245	662.957.245	0	0	0	0		
103	Kab. Seruyan	0	0	17.939.743	0	0	0	523.226	0	18.462.969	18.462.969	0	0	0	0		
104	Kab. Sukamara	356.311.691	0	0	0	74.802.578	0	0	0	431.114.269	431.114.269	0	0	0	0		
105	Kab. Lamandau	0	0	0	0	7.860.168	0	0	0	7.860.168	7.860.168	0	0	0	0		
106	Kab. Gunung Mas	0	1.277.732.692	860.975.353	0	8.326.012	43.478.397	25.111.771	0	2.215.624.225	2.215.624.225	0	0	0	0		

No.	Pemerintah Daerah	Lebih Bayar										Potongan I (ke DBH PBB Migas Triwulan II)	Potongan II (ke DBH SDA Royalti Triwulan II)	Potongan ke PPh Pasal 21 Triwulan II	Sisa Lebih Bayar	
		DBH PBB Bagian Daerah					BP PBB Bagian Daerah									Jumlah Lebih Bayar
		Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	Sektor Pertambangan Panas Bumi						
107	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	0	4.828.242	0	0	0	0	4.828.242	0	0	0	0	
108	Provinsi Kalimantan Selatan	0	18.483.561	0	0	0	718.792	0	0	0	19.202.353	0	0	0	0	
109	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	416.380	6.435.807.656	0	0	16.185	214.526.920	0	0	6.650.767.141	2.479.611.000	3.461.906.641	709.249.500	0	
110	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	56.116.694	0	0	0	1.870.544	0	0	57.987.238	0	0	0	0	
111	Kab. Kotabaru	0	586.261.932	22.597.204.542	0	0	0	753.240.148	0	0	23.959.505.696	2.571.009.500	20.987.384.946	401.111.250	0	
112	Kab. Tapin	0	356.956	0	0	0	13.876	0	0	0	370.832	0	0	0	0	
113	Kab. Tanah Bumbu	0	0	14.448.874.396	0	0	0	481.629.142	0	0	14.930.503.538	1.959.105.250	12.590.174.288	381.224.000	0	
114	Kab. Berau	0	255.876.749	0	0	0	10.661.522	0	0	0	266.538.271	0	0	0	0	
115	Kab. Kutai Kartanegara	0	234.218.830	0	0	0	0	0	0	0	243.977.938	243.977.938	0	0	0	
116	Kab. Kutai Barat	0	0	0	0	66.100.045	0	0	0	0	66.100.045	66.100.045	0	0	0	
117	Kab. Pasir	0	567.018.929	0	0	0	23.625.788	0	0	0	590.644.717	590.644.717	0	0	0	
118	Kota Bontang	0	0	9.282.646	0	0	0	322.303	0	0	9.604.949	9.604.949	0	0	0	
119	Kab. Penajam Paser Utara	0	13.164.924	0	0	0	0	0	0	0	13.713.454	13.713.454	0	0	0	
120	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	448.778.325	0	0	0	18.699.082	0	0	467.477.407	467.477.407	0	0	0	
121	Kab. Minahasa	387.738	0	0	0	68.646	0	0	0	0	456.384	456.384	0	0	0	
122	Kab. Kepulauan Sangihe	0	0	70.743.001	0	0	0	2.210.714	0	0	72.953.715	72.953.715	0	0	0	
123	Kota Bitung	0	0	851.548.649	0	0	0	26.610.882	0	0	878.159.531	878.159.531	0	0	0	
124	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	67.509.040	0	0	0	2.109.649	0	0	69.618.689	69.618.689	0	0	0	
125	Kab. Minahasa Utara	0	0	805.312.627	0	0	0	25.166.018	0	0	830.478.645	830.478.645	0	0	0	
126	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0	251.354.469	0	0	0	8.378.467	0	0	259.732.936	259.732.936	0	0	0	
127	Kab. Banggai	0	0	62.854.185	0	0	0	2.095.131	0	0	64.949.316	64.949.316	0	0	0	
128	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0	49.883	0	0	0	0	49.883	49.883	0	0	0	
129	Kab. Buol	0	0	53.974.541	0	0	0	1.799.144	0	0	55.773.685	55.773.685	0	0	0	
130	Kab. Toli-Toli	0	0	111.760.771	0	0	0	3.725.346	0	0	115.486.117	115.486.117	0	0	0	
131	Kab. Morowali	0	0	679.042.662	0	0	0	22.634.752	0	0	701.677.414	701.677.414	0	0	0	
132	Kab. Tojo Una Una	0	0	97.785.717	0	0	0	3.259.512	0	0	101.045.229	101.045.229	0	0	0	
133	Provinsi Sulawesi Selatan	0	1.401.543	0	0	0	0	27.248	0	0	1.428.791	1.428.791	0	0	0	
134	Kab. Bone	0	0	52.181.296	0	24.533.842	0	1.956.785	0	0	78.671.923	78.671.923	0	0	0	
135	Kab. Bulukumba	0	0	0	0	1.175.713	0	0	0	0	1.175.713	1.175.713	0	0	0	

No.	Pemerintah Daerah	Lebih Bayar										Potongan I (ke DBH PBB Migas Triwulan II)	Potongan II (ke DBH SDA Royalti Triwulan II)	Potongan ke PPh Pasal 21 Triwulan II	Sisa Lebih Bayar
		DBH PBB Bagian Daerah					BP PBB Bagian Daerah								
		Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan				
136	Kab. Gowa	0	5.606.223	0	0	0	245.262	0	0	0	5.851.485	0	0	0	
137	Kab. Sinjai	0	0	514.199	0	0	0	19.277	0	0	533.476	0	0	0	
138	Kab. Konawe Utara	72.216.113	0	0	0	15.345.917	0	0	0	0	87.562.030	0	0	0	
139	Kab. Manggarai Barat	0	0	2.250.409	0	0	0	78.132	0	0	2.328.541	0	0	0	
140	Kab. Seram Bagian Timur	0	86.418.633	0	0	0	3.000.636	0	0	0	89.419.269	0	0	0	
141	Provinsi Papua	0	322.936.530	0	0	0	17.940.907	0	0	0	340.877.437	0	0	0	
142	Kab. Mimika	0	83.882.981	0	0	2.438.760	2.912.593	0	0	0	89.234.334	0	0	0	
143	Kab. Sarmi	0	0	256.474.121	0	0	0	8.014.808	0	0	264.488.929	0	0	0	
144	Kab. Boven Digoel	0	1.239.935.259	0	0	0	43.053.303	0	0	0	1.282.988.562	0	0	0	
145	Kab. Intan Jaya	0	9.695.516	0	0	0	336.648	0	0	0	10.032.164	0	0	0	
146	Kab. Deiyai	0	6.710.878	0	0	0	233.006	0	0	0	6.943.884	0	0	0	
147	Provinsi Maluku Utara	0	0	308.264.281	0	0	0	5.137.723	0	0	313.402.004	0	0	0	
148	Kab. Halmahera Tengah	0	0	11.679.646	0	0	0	437.971	0	0	12.117.617	0	0	0	
149	Kab. Halmahera Selatan	0	0	1.221.377.529	0	0	0	45.801.655	0	0	1.267.179.184	0	0	0	
150	Provinsi Banten	0	52.988.275	0	0	0	2.060.650	0	0	0	55.048.925	0	0	0	
151	Kab. Lebak	0	67.544.654	0	0	0	2.626.726	0	0	0	70.171.380	0	0	0	
152	Kab. Pandeglang	0	144.408.497	0	0	0	5.615.871	0	0	0	150.024.368	0	0	0	
153	Provinsi Gorontalo	0	0	9.605.578	0	0	0	400.231	0	0	10.005.809	0	0	0	
154	Kab. Gorontalo Utara	0	0	38.422.363	0	522.385	0	1.200.693	0	0	40.145.441	0	0	0	
155	Provinsi Kepulauan Riau	0	0	2.228.051.314	0	0	0	74.268.376	0	0	2.302.319.690	0	0	0	
156	Kab. Karimun	0	0	8.912.205.307	0	0	0	297.073.504	0	0	9.209.278.811	3.912.063.561	1.281.904.250	0	
157	Provinsi Papua Barat	0	20.831.059	0	0	0	462.912	0	0	0	21.293.971	0	0	0	
158	Kab. Fak Fak	0	24.863.021	0	0	0	1.070.482	0	0	0	25.933.503	0	0	0	
159	Kab. Sorong	0	6.450.017	0	0	0	277.696	0	0	0	6.727.713	0	0	0	
160	Kab. Raja Ampat	0	4.765.141	0	0	0	205.160	0	0	0	4.970.301	0	0	0	
161	Kab. Sorong Selatan	0	6.101.793	0	0	0	262.710	0	0	0	6.364.503	0	0	0	
162	Kab. Kaimana	0	41.144.247	0	0	0	1.771.473	0	0	0	42.915.720	0	0	0	
163	Provinsi Sulawesi Barat	0	7.624.197	0	0	0	105.890	0	0	0	7.730.087	0	0	0	
164	Kab. Mamuju	0	30.496.822	0	0	0	1.376.581	0	0	0	31.873.403	0	0	0	

No.	Pemerintah Daerah	Lebih Bayar										Potongan I (ke DBH PBB Migas Triwulan II)	Potongan II (ke DBH SDA Royalti Triwulan II)	Potongan ke PPh Pasal 21 Triwulan II	Sisa Lebih Bayar	
		DBH PBB Bagian Daerah					BP PBB Bagian Daerah									
		Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan Nonmigas Lainnya	Sektor Pertambangan Panas Bumi	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan					Sektor Pertambangan Panas Bumi
165	Provinsi Kalimantan Utara	0	39.757.704	0	0	0	0	0	1.104.367	0	0	0	0	0	0	0
166	Kab. Malinau	0	502.922.240	0	0	0	0	20.955.082	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	4.883.797.287	19.438.031.502	73.680.114.221	205.459.872	2.068.219.945	770.862.909	2.422.768.057	8.132.784	103.477.386.577	54.182.547.210	45.406.371.653	3.888.467.714	0	0	0

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,


 H. BOEDIARSO TEGUH WIDODO